

# BAB 9

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja Daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Acuan yang digunakan tingkat pencapaian dari penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan amanat UU No. 32/2004 dan PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kualitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indek pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan paramater “Peningkatan Kualitas Manusia” dan Indikatornya adalah nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Selain berdasarkan dari PP RI Nomor 6 Tahun 2008, penetapan indikator ini juga merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Penetapan Indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
  - Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
  - Fokus kesejahteraan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi:
  - Fokus Layanan Urusan Wajib;
  - Fokus Layanan Urusan Pilihan.
3. Aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
  - Fokus kemampuan ekonomi daerah;
  - Fokus fasilitas daerah / infrastruktur;
  - Fokus iklim berinvestasi;
  - Fokus sumber daya manusia.

Indikator kinerja yang berkaitan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi memperlihatkan hal-hal yang berkaitan dengan makro ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2011 sebesar 4,34% diharapkan dapat dipacu hingga menjadi 5,44% pada tahun 2016. . Laju inflasi sebesar 6,5 pada tahun 2011 diharapkan dapat ditekan menjadi 4% pada tahun 2016. PDRB perkapita pada tahun 2011 sebesar Rp 5.847.000,00 diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp 8.970.000,00 pada tahun 2016. Indeks gini pada tahun 2011 sebesar 0,19 diharapkan dapat ditekan menjadi 0,13 sehingga ketimpangan pemerataan distribusi pendapatan dapat diperkecil, dengan kata lain semakin terjadi pemerataan pendapatan ekonom di masyarakat.

Selanjutnya indeks ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional) yang pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 0,70 diharapkan dapat diperkecil menjadi 0,66.

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat pula dari prosentase penduduk di atas garis kemiskinan, di mana pada tahun 2011 besarnya mencapai 81,24, pada tahun 2016 diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 88,51%.

Dalam rangka pengarusutamaan gender, maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,76 pada tahun 2011 diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 70,11 pada tahun 2016, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,23 pada tahun 2010 dapat ditingkatkan menjadi 71,28.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak pada tahun 2010 sebesar 72,58% diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 74,09 pada tahun 2016.

Untuk mendapatkan gambaran tentang proyeksi capaian indikator kinerja hingga akhir tahun masa RPJMD Kabupaten Demak Taun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IX.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Demak**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>									
<b>1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%) / Pertumbuhan Ekonomi	Lintas SKPD	4,12	4,34	4,56	4,78	5,00	5,44	5,44
1.2.	Laju inflasi kabupaten (%)	Lintas SKPD	3,49	6,50	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00
1.3.	PDRB per kapita (Rp 000)	Lintas SKPD	5.620,418	5.847	6.370	6.939	7.559	8.235	8.970
1.3.	PDRB per kapita (Rp 000)	Lintas SKPD	5.620,418	5.847	6.370	6.939	7.559	8.235	8.970
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Lintas SKPD							
1.6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Lintas SKPD			0,70	0,69	0,68	0,67	0,66
1.7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	Lintas SKPD	81,24	82,71	84,07	85,32	86,47	87,53	88,51
1.8.	Angka kriminalitas yang tertangani	Satpol PP	3,20	3,67	1,75	1,89	2,03	2,12	2,22
1.9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Lintas SKPD	72,58	-	73,09	73,34	73,59	73,84	74,09
1.10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	KP2PA	68,76	-	69,03	69,30	69,57	69,84	70,11
1.9.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	KP2PA	70,23	-	70,44	70,65	70,86	71,07	71,28

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>									
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>								
1.1.	Angka melek huruf (%)	Dikmudora	91, 36	100	100	100	100	100	100
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Dikmudora	7,59	7,59	7,69	7,79	7,85	7,90	7,95
1.3.	Angka partisipasi kasar:								
	- APK SD/MI (%)	Dikmudora	88, 68	100 ,03	100 ,08	100 ,12	100 ,15	100 ,16	100, 17
	- APK SMP/MTs (%)	Dikmudora	80, 71	79 ,38	79 ,58	79 ,68	79 ,78	79 ,88	79, 88
	- APK SMA/MA/SMK (%)	Dikmudora	43, 65	43 ,65	44 ,75	45 ,65	50 ,75	55 ,75	60, 75
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)	Dikmudora	95, 10	95 ,15	95 ,21	95 ,32	95 ,42	95 ,53	95, 65
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)	Dikmudora	95, 10	95 ,15	95 ,21	95 ,32	95 ,42	95 ,53	95, 65
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	Dikmudora	84,12	84,15	84,16	84,17	84,18	84,19	84,2
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	Dikmudora	60,56	67,21	67,27	67,32	67,37	67,24	67,24
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	Dikmudora	32,24	35,32	35,37	35,42	35,52	35,57	35,34
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>								
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	Dinkes	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
2.2.	Angka usia harapan hidup	Dinkes	71,24	71,5	72	72,1	72,2	72,3	72,4
2.3.	Persentase balita gizi buruk (%)	Dinkes	< 1 %	1,29%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>3.</b>	<b>Pertanahan</b>								
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan (%)	Setda - Pemum	9.9	9.9	10.89	10.89	11.987	13.18	14.49
<b>4.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	Dinsosnakertrans	0,944	0,945	0,946	0,947	0,947	0,948	0,949
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>									
<b>1.</b>	<b>Kebudayaan</b>								
1.2.	Jumlah gedung kesenian	Disparbud	0	0	0	0	0,0001	0,0001	0,0001
<b>2.</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>								
2.1.	Jumlah klub olahraga	Dikmudora	45	45	46	46	47	47	48
2.2.	Jumlah gedung olahraga	Dikmudora	2	2	3	3	3	4	4
2.2.	Jumlah gedung olahraga	Dikmudora	2	2	3	3	3	4	4
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>									
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>								
1.1.	<i>Pendidikan dasar:</i>								
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	Dikmudora	87,56	90,42	90,43	90,44	90,45	90,46	90,48
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Dikmudora	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
1.1.3.	Rasio guru/murid	Dikmudora	0,03	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Dikmudora	0,03	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
1.2.	<i>Pendidikan menengah:</i>								
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	Dikmudora	12,59	35,15	35,17	35,19	35,2	35,21	35,23
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Dikmudora	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	Dikmudora	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,02	0,02
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Dikmudora	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,02	0,02
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	Dikmudora	90,95	90,98	100	100	100	100	100
1.3.	<i>Fasilitas Pendidikan:</i>								
1.3.1	Ruang kelas kondisi baik (%):	Dikmudora	57.12	57.12	60.25	60.25	60.25	60.25	75.25
	- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)								
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)								
1.4.	<i>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</i>								
1.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (Formal) (%)	Dikmudora	33,87	33,87	33,9	33,92	33,95	40,1	34,5
1.4.2	Pendidikan Anak Usia Dini (Non Formal) (%)	Dikmudora	29,85	29,95	30,10	30,50	30,60	30,75	30,75
1.4.3	Pembinaan PAUD (wilayah kecamatan)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
1.5.	<i>Angka Putus Sekolah:</i>								
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Dikmudora	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Dikmudora	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Dikmudora	0,71	0,69	0,65	0,63	0,6	0,58	0,68
1.6.	<i>Angka Kelulusan:</i>								
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Dikmudora	99,51	93,5	99,52	99,52	99,54	99,55	99,55
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Dikmudora	83,91	99,82	99,85	99,85	99,86	99,86	99,86
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Dikmudora	95,21	98,61	98,61	98,62	98,62	98,63	98,63
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Dikmudora	91,29	99%	99%	99%	99%	99%	100%
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Dikmudora	52,94	74,86	74,86	74,86	74,86	74,86	75%
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dikmudora	77,91	85%	85%	85%	85%	85%	95%
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>								
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	Dinkes	13,33	13,47	13,47	13,41	13,34	13,27	13,21
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinkes	0,000236449	0,000234806	0,000233174	0,000231553	0,000229943	0,000228345	0,000226758
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Dinkes	0,0000028	0,0000028	0,0000028	0,0000028	0,0000036	0,0000036	0,0000036
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Dinkes	0,0000277	0,00002898	0,00003016	0,00003133	0,00003248	0,00003362	0,00003473
2.5.	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Dinkes	0,00006296	0,00006429	0,00006570	0,00006708	0,00006844	0,00007068	0,00007289
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	Dinkes	100,00	100,00	88,00	90,01	92,99	94,98	97,98

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	Dinkes	100,00	100,00	95,20	95,20	95,30	95,30	95,30
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization/UCI (%)	Dinkes							
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Dinkes	67,9	65,2	72,00	74,00	76,00	78,00	85,00
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
		RSUD	3.526	6.225	6.350	6.470	6.590	6.720	6.850
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.14.	Cakupan puskesmas	Dinkes	99,40	100,00	100,99	99,40	99,50	99,60	99,70
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.16.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	Dinkes	97,11	99,74	96,00	97,00	97,56	99,00	100,00
2.17.	Cakupan Pelayanan Nifas (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.18.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	Dinkes	100	92,16	90,00	93,01	96,00	98,99	100,00
2.19.	Cakupan Pelayanan anak balita (%)	Dinkes	81,72	100,84	100,90	100,90	100,90	100,90	100,90
2.20.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.21.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.22.	Cakupan peserta KB aktif (%)	Dinkes	74,83	75,55	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
2.23.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.24.	Cakupan yankesdas masyarakat miskin (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.25.	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.26.	Cakupan desa siaga aktif (%)	Dinkes	33,00	33,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00
2.27.	Cakupan Penderita HIV/AIDS yang ditangani (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.28.	Penderita DBD yang ditangani (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.29.	Kasus malaria yang ditemukan dan diobati sesuai prosedur (%)	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
2.30.	Cakupan kunjungan (orang)	RSUD	62.390	63.183	66.340	69.650	73.140	76.700	80.600
2.31.	Bed Occupancy Rate/BOR (hari)	RSUD	67.7	64.45	71.4	73.7	75.9	80.4	82.6
2.32.	Average Length of Stay/AvLOS (hari)	RSUD	3.96	3.96	4.06	4.16	4.26	4.36	4.36
2.33.	Turn Over Interval TOI (hari)	RSUD	2.3	1.84	1.8	1.7	1.5	1.5	1.3
2.34.	BTO (kali)	RSUD	69.1	70.49	7.59	73.0	74.46	75.94	77.45
2.35.	Net Death Rate /NDR (%)	RSUD	22	22	21	20	19	18	18
2.37.	Maternal Death Rate (%)	RSUD	0	0	0	0	0	0	0
2.38.	Neonatal Death Rate (%)	RSUD	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
2.39.	Kepuasan pelanggan (%)	RSUD	86	86	≥87	≥88	≥89	≥90	≥90
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	DPUPPE	49,46	56,12	61,53	71,02	80,92	88,33	95,33
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	DPUPPE	0,4998	0,5010	0,5607	0,5716	0,5917	0,6020	0,6063
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Setda - Bag. Kesra	0.00457	0.00462	0.00466	0.00471	0.00476	0.00481	0.00486
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	DPUPPE	0,193	0,193	0,217	0,242	0,266	0,290	0,315
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	DPUPPE	0,193	0,193	0,217	0,242	0,266	0,290	0,315
3.8.	Rasio permukiman layak huni	DPUPPE	0,4533	0,4760	0,4986	0,5212	0,5440	0,5666	0,5893
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	DPUPPE	0,2055	0,2331	0,2732	0,3150	0,3464	0,3761	0,4075
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	DPUPPE	789,980	789,980	789,980	789,980	789,980	789,980	789,980
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	DPUPPE	49,46	56,12	61,53	71,02	80,92	88,33	95,33
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	DPUPPE	6,036	6,036	6,036	6,083	6,130	6,177	6,224
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	DPUPPE	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	DPUPPE	12,50	12,50	14,40	14,20	13,50	11,90	11,50
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	DPUPPE	42,22	42,22	44,14	46,07	48,00	49,92	51,85
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	DPUPPE	-	-	-	12,50	12,50	12,50	12,50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	lingkup kewenangan kota (%)								
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	DPUPPE	50,00	51,00	56,09	57,18	59,19	60,22	60,65
3.18.	Lingkungan Pemukiman (%)	DPUPPE	1,22	1,22	1,16	1,10	1,03	0,97	0,97
3.19.	Jml pembangunan infrastruktur kelurahan (paket)	Kelurahan	6	6	6	6	6	6	6
3.20.	Jml pembangunan infrastruktur antar desa (paket)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
<b>4.</b>	<b>Perumahan</b>								
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	DPUPPE	16,94	17,31	17,67	18,41	19,22	20,40	21,66
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	DPUPPE	41,20	43,26	45,32	47,38	49,44	51,50	53,56
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	DPUPPE	21,94	23,04	24,13	25,23	26,33	27,42	28,52
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	DPUPPE	1,99	2,09	2,58	2,48	2,38	2,19	2,09
4.5.	Rumah layak huni (%)	DPUPPE	33,88	35,57	37,27	38,96	40,66	42,35	44,04
<b>5.</b>	<b>Penataan Ruang</b>								
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	DPUPPE	0,0179	0,0188	0,0197	0,0206	0,0215	0,0224	0,0233
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	DPUPPE	0,723	0,723	0,823	0,922	0,922	1,054	1,186
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	DPUPPE	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang (%)	Bappeda	-	100	47,83	69,57	78,26	91,30	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.5	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian tata ruang (%)	Bappeda	-	-	100	100	100	100	100
<b>6.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Tingkat ketersediaan data/informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (%)	Bappeda	100	100	17,95	38,46	58,97	79,49	100
6.6	Tingkat penyelenggaraan bintek/pelatihan/sosialisasi perencanaan (%)	Bappeda	100	100	20,00	40,00	60,00	80,00	100
6.7	Tingkat ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah (%)	Bappeda, Setda - Orpeg-Pemum-Pembangunan, 14 Kec, 6 Kel	100	100	18,45	38,10	56,55	75,00	100
6.8	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (%)	Bappeda	100	100	24,14	44,83	65,52	82,76	100
6.9	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan sosbud (%)	Bappeda	100	100	35,00	55,00	70,00	85,00	100
6.10	Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah (%)	Bappeda	100	100	14,29	40,48	59,52	78,57	100
6.11	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan (%)	Bappeda	100	100	25,00	56,25	68,75	81,25	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.12	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA (%)	Bappeda	100	100	28,57	57,14	71,43	85,71	100
6.13	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan (%)	Bappeda	100	100	0,00	33,33	55,56	77,78	100
6.14	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (%)	Bappeda	0	0	23,53	47,06	64,71	82,35	100
6.15	Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana	Bappeda	100	100	28,57	57,14	71,43	85,71	100
6.16	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2010	Setda - Pemum	Tidak tepat	Tidak tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
6.17	Jml kerjasama dengan daerah lain (MoU)	Setda - Pemum	2	2	2	2	2	2	2
6.18	Jml Rencana Pembangunan Kecamatan yang tersusun (dok)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
6.19	Jml Rencana Kerja Kelurahan yang tersusun (dok)	Kelurahan	6	6	6	6	6	6	6
<b>7.</b>	<b>Perhubungan</b>								
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Dishubkominfo	5.007.851	5.057.930	5.159.088	5.107.497	5.158.572	5.235.951	5.256.895
7.2.	Rasio ijin trayek	Dishubkominfo	0,00039	0,00039	0,00038	0,00038	0,00038	0,00038	0,00038
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Dishubkominfo	6.499	6.694	6.890	7.166	7.461	7.601	7.898
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Dishubkominfo	2	2	2	2	2	3	3
7.5.	Angkutan darat (%)	Dishubkominfo	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	Dishubkominfo	3,09	3,09	4,17	4,17	4,17	4,17	5,27
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	Dishubkominfo	15	15	15	10	10	10	10
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Dishubkominfo	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu (%)	Dishubkominfo	43,00	54,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
<b>8.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>								
8.1.	Persentase penanganan sampah (%)	DPUPPE	72,08	72,08	72,04	72,17	72,30	72,43	72,56
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	DPUPPE	14,16	14,16	14,26	14,38	14,44	14,53	14,62
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)	DPUPPE	60,38	60,38	60,41	60,45	60,48	60,52	60,55
8.4.	Pencemaran status mutu air (%)	KLH	100	50	20	20	20	20	20
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	KLH	100	0	15,87	18,65	21,03	21,83	22,62
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)	KLH	87,50	88,89	20	20	20	20	20
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	DPUPPE	0,04	0,204	0,230	0,256	0,281	0,307	0,333
8.8.	Penegakan hukum lingkungan (%)	KLH	100	166,67	20	20	20	20	20
8.9.	Meningkatnya kebersihan pasar (%)	Disperindagkop UMKM	100	100	100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Pertanahan</b>								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	Setda - Pemum	-	1,23	-	-	-	-	-
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	Setda - Pemum	100	100	100	100	100	100	100
9.3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	BPPTPM		98,18	98,18	98,18	98,18	98,25	98,5
<b>10.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>								
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Dukcapil	0,9 99	0, 999	0, 998	0, 997	0, 995	0, 994	0,9 93
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	Dukcapil	1,275	1,301	1,320	1,353	1,381	1,405	1,424
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	Dukcapil	0,584	0,592	0,597	0,599	0,606	0,617	0,619
10.4.	Kepemilikan KTP (%)	Dukcapil	99, 94	99 ,95	99 ,95	99 ,95	99 ,96	99 ,98	99, 99
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	Dukcapil	0, 61	61 ,28	61 ,28	61 ,95	62 ,33	62 ,55	62, 56
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Dukcapil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Dukcapil	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>11.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	KP2PA	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	KP2PA	56	56	57	58	59	60	61
11.3.	Rasio KDRT	KP2PA	0,016	0,020	0,010	0,009	0,008	0,007	0,006
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	KP2PA, Dinsosakertrans		8 ,20	7 ,50	7 ,00	6 ,50	6 ,00	5, 50
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	KP2PA	55	54	56	57	58	59	60

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	KP2PA	27	28	29	31	33	35	37
11.7.	Kontribusi Perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian (%)	KP2PA	40,6	40,8	41	41,2	41,4	41,6	41,8
11.8.	Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar (%)	KP2PA	103,0	94	95,0	96,0	97,0	99,0	100,0
11.9.	Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah (%)	KP2PA	95,7	105,8	104	103	102	101	100
11.10.	Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada perguruan tinggi (%)	KP2PA	120	85,7	90	92	94	96	100
11.11.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	KP2PA	104,9	100,9	100,8	100,6	100,4	100,2	100
11.12.	Persentase perempuan di lembaga legislatif (%)	KP2PA	18	18	18	18	30	30	30
11.13.	Rasio kekerasan terhadap anak (%)	KP2PA	0,010	0,014	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005
11.14.	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS (%)	KP2PA	-	-	-	100	100	100	100
11.16.	Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani di unit pelayanan terpadu (%)	KP2PA	-	-	-	100	100	100	100
11.17.	Jml PKK aktif	Kecamatan							
	- PKK Kecamatan		14	14	14	14	14	14	14
	- PKK Desa/Kelurahan		249	249	249	249	249	249	249
<b>12.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Bapermas KB	2,17	2,16	2,15	2,14	2,12	2,11	2,10
12.2.	Rasio akseptor KB (%)	Bapermas KB	748,30	750,90	751,50	752,40	753,60	755,30	756,80
12.3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	Bapermas KB	74,83	75,09	75,15	75,24	75,36	75,53	75,68
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	Bapermas KB	64,10	61,95	60,75	59,63	58,67	57,86	57,24
12.5.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Keluarga Miskin dan Rentan (%)	Bapermas KB	74,73	74,83	74,94	75,02	75,12	75,24	75,35
12.6.	Menurunnya TFR	Bapermas KB	2,17	2,16	2,15	2,14	2,12	2,11	2,10
12.7.	Meningkatnya partisipasi peserta KB mandiri terhadap peserta aktif (%)	Bapermas KB	45,09	45,12	45,24	45,36	45,46	45,57	45,62
12.8.	Meningkatnya peserta KB Pria (%)	Bapermas KB	1,65	1,70	1,79	1,82	1,89	1,94	1,98
12.9.	Menurunnya persentase <i>Unmetneed</i> (%)	Bapermas KB	10,87	9,98	9,89	9,74	9,65	9,53	9,32
12.10.	Terbentuknya PIK - KRR	Bapermas KB	14	14	16	18	20	24	26
12.11.	<i>Cakupan Catur Bina (%)</i> :								
	- BKB	Bapermas KB	26,38	27,45	55,96	56,96	57,57	58,26	58,94
	- BKR	Bapermas KB	14,98	17,20	22,17	22,63	23,09	24,01	24,46
	- BKL	Bapermas KB	14,98	17,20	22,17	22,63	23,09	24,01	24,46
	- BLK	Bapermas KB	1,61	2,01	2,81	5,62	9,64	15,26	16,87
12.12.	Drop Out Keluarga Berencana (DO KB) - %	Bapermas KB	13,01	15,32	13,05	12,15	11,42	10,25	9,96

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13.	<b>Sosial</b>								
13.1.	<i>Sarana sosial seperti:</i>								
	- Panti Asuhan	Dinsosnakertrans	38	38	38	38	38	38	38
	- Panti Jompo	Dinsosnakertrans	1	1	1	1	1	1	1
	- Panti Rehabilitasi	Dinsosnakertrans	3	3	3	3	3	3	3
	- Panti Rehabilitasi cacat	Dinsosnakertrans	1	1	1	1	1	1	1
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	Dinsosnakertrans	6,79%	7,71%	8,35%	8,65%	9,05%	9,46%	9,73%
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	Dinsosnakertrans	8,52%	9,42%	9,60%	9,69%	9,78%	9,96%	10,24%
13.4.	Prosentase Panti Sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial (%)	Dinsosnakertrans	23,26%	30,23%	39,53%	46,51%	58,14%	65,12%	76,74%
13.5.	Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	Dinsosnakertrans	58,14%	58,14%	69,77%	69,77%	76,74%	79,07%	81,40%
13.6.	Tersedianya dana APBD Kab. untuk jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental (Cacat ganda), serta lanjut usia tidak potensial (Ada/ Tidak)	Dinsosnakertrans	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
13.7.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Setda - Kesra	0.00457	0.00462	0.00466	0.00471	0.00476	0.00481	0.00486
13.8.	Jumlah petugas yang mendampingi pelaksanaan ibadah haji	Setda - Kesra	10	10	11	12	12	12	12
13.9.	Jumlah guru TPQ yang mendapat pembinaan (org)	Setda - Kesra	338	287	450	500	550	600	650
13.10.	Jumlah guru Madin yang mendapat pembinaan (org)	Setda - Kesra	568	568	600	650	650	700	750
13.11.	Jumlah TPQ/Madin yang mendapat bantuan (unit)	Setda - Kesra	907	907	908	1200	1400	1400	1450
13.12.	Jumlah tempat peribadatan yang mendapat bantuan (unit)	Setda - Kesra	300	150	167	200	225	250	300

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13.13.	Jumlah bantuan kepada LPTQ (Rp juta)	Setda - Kesra	30	50	60	65	70	75	80
13.14	Fasilitasi forum ulama-umaro' (Ada/Tidak)	Setda - Kesra	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>14.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	Dinsosnakertrans	71,05	71,13	71,94	72,88	73,28	74,04	74,86
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	Dinsosnakertrans	0,64	0,85	0,85	0,64	0,64	0,43	0,43
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Dinsosnakertrans	68.20	70,59	71,48	72,04	72,69	73,72	73,67
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	Dinsosnakertrans	37,60	30,44	37,89	38,52	38,92	39,98	40,56
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Dinsosnakertrans	5.69	5,49	5,38	5,31	5,26	5,19	5,08
14.6.	Keselamatan dan perlindungan (%)	Dinsosnakertrans	37,87	38,30	40,00	41,49	45,11	45,74	47,87
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	Dinsosnakertrans	66,67	75,00	50,00	66,67	66,67	50,00	50,00
14.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi/ masyarakat	Dinsosnakertrans	60,69	71,46	78,75	80,00	85,75	85,99	86,88
14.9.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek	Dinsosnakertrans	46,07	48,63	50,16	50,68	51,19	53,75	56,31
14.10.	Pengawasan Ketenagakerjaan Besaran pemeriksaan Perusahaan	Dinsosnakertrans	15,32	19,15	23,40	25,53	29,79	32,98	34,04
14.11.	Upah Minimum Kabupaten / UMK (Rp ribu)	Dinsosnakertrans	813,40	847,99	893,00	1.020,38	1.075,43	1.130,47	1.185,51
14.12.	Kebutuhan Hidup Layak / KHL (Rp ribu)	Dinsosnakertrans	874,21	910,30	965,34	1.020,38	1.075,43	1.130,47	1.185,51
14.13.	Rasio pencapaian KHL (%)	Dinsosnakertrans	93,04	93,16	92,51	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>15.</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>								
15.1.	Persentase Koperasi Aktif (%)	Disperindagkop UMKM	66, 00	66 ,00	67 ,00	68 ,00	70 ,00	72 ,00	74, 00
15.2.	Jumlah UKM non BPR / LKM UKM (unit)	Disperindagkop UMKM		652	665	678	692	705	7 20
15.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	Disperindagkop UMKM		42	42	42	42	42	42
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	Disperindagkop UMKM	309, 00	309 ,00	315 ,00	316 ,00	317 ,00	318 ,00	319, 00
15.5.	Meningkatnya Omset Penjualan UMKM (%)	Disperindagkop UMKM	5, 00	7 ,00	9 ,00	11 ,00	13 ,00	15 ,00	17, 00
15.6.	Jumlah UMKM Pengakses Program Kredit Pemberdayaan UMKM	Setda - Perek.	1.525	1.325	1.150	1.265	1.297	1.323	1.349
15.7.	Jml kecamatan yang melaksanakan pengembangan UKM Sektor Unggulan (kec)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
<b>16.</b>	<b>Penanaman Modal</b>								
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	BPPTPM		35	37	40	50	55	60
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp 000.000)	BPPTPM		341. 716	642. 736	7.780. 718	913. 299	1.048. 581	1.183.8 62
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	BPPTPM	-	460	769	769	769	769	3.7 69
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	BPPTPM	-	-	-	-	-	-	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>17.</b>	<b>Kebudayaan</b>								
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Disparbud	11	1	7	8	8	8	8
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Disparbud	0	0	0	0	0	1	0
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Disparbud	100	100	100	100	100	100	100
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>								
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Dikmudora	15	15	17	20	23	25	30
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	Dikmudora	70	75	78	83	90	93	95
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Dikmudora	7	10	12	15	17	20	23
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Dikmudora	9	9	11	15	18	20	25
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Dikmudora	1	1	1	1	1	1	1
18.6.	Lapangan olahraga	Dikmudora	274	274	277	280	282	285	289
18.7.	Jml karangtaruna yang aktif (desa/kelurahan)	Kecamatan	249	249	249	249	249	249	249
18.8.	Jml kecamatan yang menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan pemuda (kec)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
18.8.	Prosentase remaja bebas narkoba (%)	Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
18.8.	Jml kecamatan yang mengirim peserta Porkab (kec)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>19.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>								
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kesbangpolinmas	15	30	20	25	30	35	40
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kesbangpolinmas	38	38	38	38	38	38	38
19.3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan (%)	Kesbangpolinmas	Tidak ada pemilihan	64,82	Tidak ada pemilihan	80	80	Tidak ada pemilihan	80
19.4	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	Kesbangpolinmas		522.236					
19.5	Jumlah DPT	Kesbangpolinmas		805.661					
19.6	Jumlah parpol yang mendapat kursi di DPR per jumlah Parpol peserta Pemilu (%)	Kesbangpolinmas	34,29	34,29	34,29	34,29	42,86	42,86	42,86
19.7	Jumlah parpol yang mendapat kursi di DPR		12	12	12	12	15	15	15
19.8	Jumlah Parpol peserta Pemilu		35	35	35	35	35	35	35
19.9	Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik (%)	BPBD	100	100	100	100	100	100	100
19.10	Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana (%)	BPBD	100	100	100	100	100	100	100
19.11.	Prosentase kejadian bencana alam yang tertangani	Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
19.12.	Prosentase gangguan keamanan wilayah yang dapat diselesaikan (%)	Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
19.13.	Jumlah Linmas aktif (desa/kel)	Kecamatan	249	249	249	249	249	249	249

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
20.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Sat PolPP	0,53	0,60	0,59	1,22	1,21	1,87	1,85
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Kesbangpolinmas	70,54	70,30	69,84	69,39	68,93	68,48	68,03
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Kesbangpolinmas	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
20.4	Pertumbuhan ekonomi (%)	Lintas SKPD	4,12	4,55	4,98	5,41	5,84	6,27	6,70
20.5	Kemiskinan (%)	Lintas SKPD	81,24	82,71	84,07	85,32	86,47	87,53	88,51
20.6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (ada/Tidak ada)	BPPTPM		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.7	Penegakan PERDA (%)	Satpol PP	95	95	100	100	100	100	100
20.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	Satpol PP	22	24	24	36	60	72	72
20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	Satpol PP	39,5	87,6	100	100	100	100	100
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	Kesbangpolinmas	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	DPUPPE	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	DPUPPE	100	100	100	100	100	100	100
20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	Setda - Pemum	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Dinhubkominfo	2		2	2	2	2	2
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Setda - Orpeg	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.16	Tersusunnya laporan asset yg mendukung laporan Neraca (%)	DPKKD	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100
20.17	Meningkatnya jumlah pendapatan daerah (%)	DPKKD	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100
20.18	Meningkatnya jumlah PAD (Rp.000.000)	DPKKD	56.756	79.204	87.124	95.837	105.421	115.963	115.963
20.19	Meningkatnya PAD terhadap pendapatan daerah (%)	DPKKD	6,80	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	8,00
20.20	Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu (%)	DPKKD	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100
20.21	Opini Laporan Keuangan	Inspektorat, DPKKD	Discalimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.22	Rasio PNS Lulusan S1 (‰)	BKD	365,859	419,718	474,141	529,127	584,338	639,887	695,887
20.23	Rasio PNS Lulusan S2/S3 (‰)	BKD	32,113	43,268	54,423	65,577	76,845	88,225	99,606
20.25	Tingkat pengembangan E-Government Bidang Kepegawaian (Aplikasi)	BKD	1	1	2	2	2	2	2
20.26	Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur (‰)	BKD	0,451	0,563	1,127	1,352	1,577	1,465	1,39
20.27	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat								
	- Diklat fungsional (Org)	BKD	12	8	20	20	20	20	20
	- Diklat teknis (Org)	BKD	227	301	105	105	105	105	105
20.30	Pengiriman peserta Diklat Pim II, dan III								
	- Diklat Pim II (Org)	BKD	3	5	3	1	1	1	1
	- Diklat Pim III (Org)	BKD	7	8	3	4	4	4	4
	- Diklat Pim IV (Org)	Diklat & Litbang		40	80	80	80	40	40

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20.31	Persentase PNS mengikuti pembinaan aparaturn daerah (%)	BKD	6,20	6,20	5,35	5,63	6,20	5,07	5,07
20.32	Terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SK)	BKD	1.450	1.466	1.580	1.592	1.638	1.350	1.530
20.33	Terbitnya Surat Keputusan Pensiun (SK)	BKD	305	315	400	310	300	305	300
20.34	Terbitnya Berita Acara Sumpah Janji PNS (BA)	BKD	471	778	75	100	120	450	120
20.35	Jumlah Raperda Inisiatif yang terssun (buah)	Setwan	3	-	7	7	7	7	7
20.36	Jumlah Raperda yang ditetapkan (buah)	Setwan, Setda - Hukum	23	22	25	25	25	25	25
20.37	Rancangan Perda yang ditetapkan	Setwan, Setda - Hukum	9,00	5	20	20	20	20	20
20.38	Aspirasi masyarakat yang terjaring dan terakomodir (%)	Setwan	55,00	60	60	60	60	60	60
20.39	Jumlah Keputusan DPRD (buah)	Setwan	33	44	45	45	45	45	45
20.40	Pemahaman masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja DPRD (%)	Setwan	50A	55	57	60	62	65	65
20.41	Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP	Inspektorat		51,23	71,42	74,28	75,00	81,30	85,00
20.42	Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja	Inspektorat		80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	100,00
20.43	Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal	Inspektorat		75,00	76,50	78,00	80,00	82,00	90,00
20.44	Prosentase peningkatan kompetensi CPNS yang sesuai syarat pengangkatan (%)	Diklat & Litbang	97,75	99,57		99,20	97,75	99,67	99,75
20.46	Urusan yang sudah diterapkan SPM berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh	Setda - Orpeg	3	-	3	3	3	3	-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	pemerintah								
20.47	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	Setda - Orpeg	-	-	-	1	-	-	-
20.48	Penataan SKPD	Setda - Orpeg		-	-	1	-	-	-
20.49	Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP)	Setda - Orpeg	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.50	Keberadaan E-procurement (Ada / Tidak Ada)	Setda - Pemb.	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.51	Prosentase pelunasan PBB (%)	Kecamatan	96	99	100	100	100	100	100
20.52	Jml RAPBDes yang terivew (desa)	Kecamatan	243	243	243	243	243	243	243
20.53	Jml kecamatan yang memiliki model best practice pelayanan publik (kec)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
20.54	Ketersediaan Nota Kesepakatan KUA, PPAS, KUPA, PPASP	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>21.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>								
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Bappeluh KP		100	100	100	100	100	100
21.2.	Ketersediaan pangan utama (ton)	Bappeluh KP		311,88	322,03	332,18	342,33	352,49	362,64
21.3.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	Bappeluh KP		100	100	100	100	100	100
	- Jumlah Desa Mandiri Pangan (desa)		4	1	1	2	2	2	2
	- Jumlah Lumbung Pangan (unit)		17	6	6	6	6	6	6
	- Jumlah Gapoktan (Lembaga)		197	273	273	327	327	359	359
21.4.	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Bappeluh KP		100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(%)								
	- Ketersediaan energi (kcal/kap/hari)		2320,45	2367	2414	2462	2512	2562	2562
	- Ketersediaan protein (kcal/kap/hari)		55,1	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
	- Konsumsi energi (kcal/kap/hari)		2109,5	2102,2	2094,9	2087,6	2080,3	2072,9	2072,9
	- Konsumsi protein (kcal/kap/hari)		54,0	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
21.5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Bappeluh KP	20,00	30,00	40,00	60,00	80,00	90,00	100
21.6.	Ketersediaan informasi, pasokan harga dan akses pangan di daerah (%)	Bappeluh KP	66,67	83,33	100	100	100	100	100
21.7.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	Bappeluh KP	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	100
21.8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	Bappeluh KP	87,6	88,84	90,08	91,32	92,56	93,80	100
21.9.	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	Bappeluh KP	32,23	39,56	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00
21.10	Peningkatan SDM Penyuluh (%)	Bappeluh KP	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
21.11	peningkatan SDM Pelaku utama dan pelaku usaha (%)	Bappeluh KP	25,38	29,95	39,93	47,38	55,84	74,96	79,95
<b>22.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Bapermas KB	90	93	95	100	105	110	115
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	Bapermas KB	11,24	11,25	11,26	11,27	11,28	11,29	11,3
22.3.	Jumlah LSM (%)	Kesbangpolinmas	70	74	80	85	90	95	100
22.4.	LPM Berprestasi (%)	Bapermas KB	14	14	14	14	14	14	14
22.5.	PKK aktif (%)	Bapermas KB	100	100	100	100	100	100	100
22.6.	Posyandu aktif (%)	Bapermas KB	90	90	92	94	96	98	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	Bapermas KB	10	10	11	12	13	14	15
22.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	Bapermas KB	10	10	15	20	25	30	35
22.9	Jml desa yang mengikuti lomba desa tk. Kabupaten (desa)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
22.10	Jumlah Lembaga Desa (BPD/LKMD/RT/RW) yang aktif (desa/kel)	Kecamatan	249	249	249	249	249	249	249
22.11	Prosentase kasus ADD yang tertangani (%)	Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
22.12	Jml desa/kelurahan yang terbina administrasinya (desa/kel)	Kecamatan	249	249	249	249	249	249	249
<b>23.</b>	<b>Statistik</b>								
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Bappeda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.3	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik (%)	Bappeda, Dishumkominfo	100	100	20	40	60	80	100
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>								
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD / Desa / Kelurahan) (%)	KPA	28	35	40	50	60	80	100
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	KPA	78	78	80	85	90	95	100
24.3	Persentase peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan (%)	KPA	50	50	80	80	80	80	90

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>25.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>								
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	Dishubkominfo	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Dishubkominfo	0,067	0,067333333	0,067320261	0,067293872	0,067293344	0,067293334	0,067293333
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Setda - Humas	32	54	55	55	55	55	55
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Setda - Humas	8	14	15	15	15	15	20
25.5.	Web site milik pemerintah daerah (Ada/Tidak)	Dishubkominfo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25.6.	Pameran/expo (kali)	Dishubkominfo, Setda - Perek.	4	4	4	4	4	4	4
<b>26.</b>	<b>Perpustakaan</b>								
26.1.	Jumlah perpustakaan (Unit)	KPA	58	59	60	70	80	90	100
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Org)	KPA	40.0 30	45. 191	50. 000	55. 000	60. 000	65. 000	70.0 00
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	KPA	14.7 42	19. 135	23. 000	26. 000	30. 000	33. 000	35.0 00
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>									
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>								
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)	Dipertan	57,19	58,98	59,24	59,49	59,74	59,99	60,25

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan terhadap PDRB (%)	Dipertan	40,43	39,64	39,62	39,45	39,29	39,12	38,95
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%)	Dipertan	37,26	36,65	36,72	36,65	36,58	36,5	36,43
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	Dipertan	0,90	0,8	0,71	0,62	0,54	0,45	0,37
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	Dipertan	100	100	100	100	100	100	100
1.6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	Bappeluh KP							
1.7.	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	Dipertan	2,24	2,18	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14
<b>2</b>	<b>Kahutanan</b>								
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	Dipertan	8.333	8.993	9.783	9.840	9.890	9.920	9.935
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan(Ha)	Dipertan	456	456	456	356	256	156	0
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	Dipertan	0,015	0,014	0,014	0,013	0,013	0,012	0,012
<b>3</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	DPUPPE	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	DPUPPE	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Pariwisata</b>								
4.1.	Kunjungan wisata (%)	Disparbud	57%	58%	68%	70%	70%	70%	70%
	- Jumlah Wisatawan Mancanegara (org)	Disparbud	1.015	853	1.025	1.055	1.075	1.087	1.099
	- Jumlah Wisatawan Nusantara (org)	Disparbud	1.079.792	840.000	1.100.000	1.125.000	1.145.000	1.155.000	1.175.000
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Rp Ribu)	Disparbud	1.146.000	1.240.405	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.3.	Jml kecamatan yang mengirim lomba duta wisata & pentas seni (kec)	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14
4.4.	Lama tinggal wisatawan (hari)	Disparbud	1	2					
<b>5</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>								
5.1.	<i>Produksi perikanan (ton):</i>	Dinlutkan	25.017,6	27.303,13	29.325,93	31.523,36	33.911,67	36.508,64	39.333,79
	Produksi Perairan Umum (% - ton)	Dinlutkan	100	100	19,22	19,60	19,99	20,39	20,80
		Dinlutkan	1681,77	1650,71	1683,72	1717,39	1751,74	1786,78	1822,51
	Produksi Perikanan tangkap (% - ton)	Dinlutkan	100	100	19,22	19,60	19,99	20,39	20,80
		Dinlutkan	1845,81	1829,11	1865,69	1903,01	1941,07	1979,89	2019,49
	Produksi tambak (% - ton)	Dinlutkan	100	100	18,10	19,00	19,95	20,95	22,00
		Dinlutkan	8.343,80	8.999,18	9.449,14	9.921,59	10.417,67	10.938,56	11.485,48
	Produksi kolam (% - ton)	Dinlutkan	100	100	16,38	18,02	19,82	21,80	23,98
		Dinlutkan	13.146,25	15.084,60	16.593,06	18.252,36	20.077,60	22.085,36	24.293,89
5.2.	Konsumsi ikan (% - ton)	Dinlutkan	100	100	88,84	91,53	94,26	97,07	100
		Dinlutkan	22,1	22,1	22,76	23,45	24,15	24,87	25,62
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Dinlutkan	5	5	7	9	11	13	15
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Dinlutkan	761,1	1.901,3	1.958,4	2.017,1	2.077,6	2.139,9	2204,15
5.5.	Penanaman mangrove (Ha)	Dinlutkan	93,00	96,67	177,10	216,20	218,50	262,20	276,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>6.</b>	<b>Perdagangan</b>								
6.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	Disperindagkop UMKM	17,99	18,74	18,79	18,84	18,90	18,95	18,98
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rp)	Disperindagkop UMKM	61.788,17	54.491,87	56.733,50	57.070,10	57.470,60	57.840,20	58.400,10
6.3.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	Disperindagkop UMKM	-	-	40,00	42,00	45,00	47,00	50,00
6.4.	<i>Meningkatnya Sarana Prasarana Perdagangan:</i>	Disperindagkop UMKM							
	Peningkatan jumlah kios yg dibangun (unit)		1.224	297	20	25	30	35	35
	Peningkatan jumlah los yg dibangun (unit)		7.015	2.100	400	500	550	600	600
	Peningkatan jumlah fasilitas umum yg dibangun (unit)		11	4	2	2	2	2	2
6.5.	Meningkatnya Masyarakat dalam Penggunaan Barang sesuai Standar yang Berlaku (%)	Disperindagkop UMKM		100	100	100	100	100	100
<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>								
7.1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	Disperindagkop UMKM	9,50	10,35	10,50	10,65	10,80	10,92	11,05
7.2.	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	Disperindagkop UMKM	22,40	23,30	22,50	22,70	23,00	23,20	23,50
7.3.	Pertumbuhan Industri (%)	Disperindagkop UMKM	1,20	0,30	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7.4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	Disperindagkop UMKM	25,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
7.5.	Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (%)	Disperindagkop UMKM	5,20	2,30	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
7.6.	Meningkatnya Kualitas Produksi Industri Kecil dan Menengah (unit)	Disperindagkop UMKM	19	20	21	22	23	24	25
<b>8.</b>	<b>Ketransmigrasian</b>								
8.1.	Transmigran swakarsa (KK) (%)	DInsosnakertrans	20	22	30	30	35	35	35
8.2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	DInsosnakertrans	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>									
<b>1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (%)	Lintas SKPD	51,51	48,11	44,71	41,31	37,91	34,51	31,11
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	Lintas SKPD	48,49	51,89	55,29	58,69	62,09	65,49	68,89
1.3.	Produktivitas total daerah (Juta Rp/Org)	Lintas SKPD	11,78	12,745	13,71	14,675	15,64	16,605	17,57
<b>2.</b>	<b>Pertanian</b>								
2.1.	Nilai tukar petani (%)	Dispertan	100,75	103,52	103,64	103,85	104,12	104,45	104,64
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Perhubungan</b>								
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Dishubkominfo	7,61	6,51	5,61	4,84	4,17	3,59	3,10
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Dishubkominfo	5.007.851	5.057.930	5.159.088	5.107.497	5.158.572	5.235.951	5.256.895
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Dishubkominfo	5.007.851	5.057.930	5.159.088	5.107.497	5.158.572	5.235.951	5.256.895
<b>2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>								
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	Bappeda, DPUPPE		13,11	13,74	14,37	15,00	15,63	16,26
2.2.	Luas wilayah produktif (%)	Bappeda, DPUPPE	91,40	96,00	100	100	100	100	100
2.3.	Luas wilayah industri (%)	Bappeda, DPUPPE	0,28	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,35
2.4.	Luas wilayah banjir (%)	Bappeda, DPUPPE	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,21
2.5.	Luas wilayah kekeringan (%)	Bappeda, DPUPPE	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
2.6.	Luas wilayah perkotaan (%)	Bappeda, DPUPPE	11,59	12,20	12,81	13,42	14,03	14,64	14,64
<b>3.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
3.1.	Jumlah bank (Jenis)	Setda - Perek.	9	9	9	9	9	9	9
	1. BPR BKK								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Kantor Pusat		1	1	1	2	3	3	3
	- Cabang		8	8	8	9	11	12	13
2.	Bank Umum (PT. Bank Jateng)								
	- Kantor cabang		1	1	1	1	1	1	1
3.	Lembaga Keuangan Mikro (LKM)								
	a. BKK								
	- Kantor Pusat		1	1	1	-	-	-	-
	- Kantor Cabang		4	4	4	-	-	-	-
	b. Bank pasar								
	- Kantor Pusat		1	1	1	1	-	-	-
	- Kantor Cabang		-	-	-	-	-	-	-
	c. BKD								
	- Kantor Pusat		42	42	42	1	1	1	1
	- Kantor Cabang			-	-	-	-	-	-
	Jenis dan jumlah perusahaan non bank	Setda - Perek.							
1.	PDAM								
	- Kantor Pusat		1	1	1	1	1	1	1
	- Cabang		3	3	3	3	3	3	3
	- Unit		3	3	4	4	4	4	4
2.	PD. ANWUSA								
	- Kantor Pusat		1	1	1	1	1	1	1
	- Unit		7	7	7	7	7	7	7
3	PD. Apotik								
	- Kantor Pusat		1	1	1	1	1	1	1
	- Unit		3	3	3	4	5	5	5

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	Setda - Perek.							
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran / rumah makan & kedai / warung makan	Dinparbud	86	90	94	98	102	106	110
	- Restoran / Rumah Makan		9	11	13	15	17	19	21
	- Kedai / Warung makan		77	79	81	83	85	87	89
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Dinparbud	18	19	21	23	25	27	29
	- Hotel		4	4	4	5	5	6	6
	- Penginapan (home stay)		14	15	17	18	20	21	23
3.5.	Jumlah produktivitas Perusda dan BUMD (dalam Rp Juta)	Setda - Perek..							
	a. Jumlah Aset								
	- PT. Bank Jateng		18.710.698	18.646.233	19.940.927	20.240.041	20.543.641	20.851.796	21.894.301
	- PT. PRPP Jateng		38.203	36.293	34.478	32.754	31.116	34.228	35.939
	- PD. BPR BKK Demak Kota		79.523	87.475	96.223	105.845	116.430	128.073	173.073
	- PD. BKK Dempet		33.082	36.390	40.029	30.032	20.436	10.279	5.109
	- PD. BPR Bank Pasar		849	1.408	2.363	2.835	3.402	3.742	3.929
	- PD. Apotik Sari Husada		1.308	1.570	1.727	1.899	2.089	2.298	2.413
	- PD. ANWUSA		25.696	25.829	26.129	26.529	27.029	27.629	28.619
	- PDAM		24.909	26.671	26.938	27.207	27.479	30.227	30.540
	b. Jumlah laba								
	- PT. Bank Jateng		382.587	392.152	401.955	407.985	414.104	420.316	426.621
	- PT. PRPP Jateng		-1.675	1.717	1.760	1.804	(1.849)	(1.895)	(1.943)
	- PD. BPR BKK Demak Kota		79.523	3.121	3.745	4.120	4.532	4.985	5.483
	- PD. BKK Dempet		1.790	1.969	2.362	2.126	2.339	2.573	2.830
	- PD. BPR Bank Pasar		19	64	102	153	199	239	358
	- PD. Apotik Sari Husada		149	145	174	209	230	253	278
	- PD. ANWUSA		-1.365	900	450	90	(9)	11	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- PDAM		291	250	225	231	237	225	231
	c. Jumlah deviden ke Kab.Demak								
	- PT. Bank Jateng		2.344	3.035	3.304	3.634	3.998	4.397	4.837
	- PT. PRPP Jateng		0	0	0	0	0	0	0
	- PD. BPR BKK Demak Kota		985	751	765	918	1.009	1.110	1.221
	- PD. BKK Dempet		32	702	640	768	691	760	836
	- PD. BPR Bank Pasar		25	21	35	56	84	109	131
	- PD. Apotik Sari Husada		67	50	80	96	115	127	139
	- PD. ANWUSA		0	0	0	0	0	0	0
	- PDAM		400	250	138	124	127	130	124
<b>4.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>								
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	DPUPPE	9,9	10,89	11,987	13,18	14,49	15,94	17,54
<b>5.</b>	<b>Komunikas dan Informatika</b>	Dishubkominfo							
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik	DPUPPE	40,17	40,17	40,244	40,317	40,391	40,464	40,538
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	DPUPPE	43,285	43,285	45,32	47,38	49,44	51,5	53,56
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Dishubkominfo	9,333 33	10,26 667	10,58 824	11,56 409	12,02 134	13,19 733	13,785 33
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.1.	Angka kriminalitas	Satpol PP	3,09	5,25	3,25	3,32	3,39	3,46	3,53
1.2.	Jumlah demo	Kesbangpolinmas	13	16	12	11	10	9	8
1.3.	Lama proses perijinan	BPPTPM							
	- Reklame (hari kerja)	BPPTPM		2	2	2	2	2	2
	1. Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) hari	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	2. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) hari	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	3.Tanda Daftar Gudang ( TGD ) hari	BPPTPM		7	7	7	7	7	7
	4. Izin Usaha Industri ( IUI ) hari	BPPTPM		7	7	7	7	7	7
	5. Izin Usaha Angkutan ( IUA ) hari	BPPTPM		5	5	5	5	5	5
	6. Izin Pedagang Pasar ( hari )	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	7. Izin Pariwisata terdiri dari : ( hari )	BPPTPM							
	(1). Izin Usaha Angkutan Wisata Bus	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	(2). Izin Usaha salon Kecantikan	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	(3). Izin Usaha Restoran	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	(4). Izin Usaha Khusus Hotel	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	8. Izin Kartu Pengawasan / Izin Trayek	BPPTPM		3	3	3	3	3	3
	9. Izin Reklame	BPPTPM		2	2	2	2	2	2
	10. Izin Lokasi	BPPTPM		12	12	12	12	12	12
	11. Izin HO ( Izin Gangguan Lingkungan )	BPPTPM		15	15	15	15	15	15
	12. Izin SITU	BPPTPM		15	15	15	15	15	15
	13.Izin IMB	BPPTPM		15	15	15	15	15	15
1.4.	<i>Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah :</i>	BPPTPM							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SKPD	KONDISI AWAL		TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Pajak Reklame	BPPTPM		1	1	1	1	1	1
	- Retribusi per 26 Oktober tahun 2011	BPPTPM		17	-	-	-	-	-
	<i>Retribusi untuk tahun 2012 antara lain :</i>	BPPTPM							
	- Retribusi Kartu Pengawasan	BPPTPM		1	1	1	1	1	1
	- Retribusi Izin angkutan/Izin Trayek	BPPTPM		1	1	1	1	1	1
	- Retribusi Izin HO & SITU	BPPTPM		1	1	1	1	1	1
	- Retribusi Izin IMB	BPPTPM		1	1	1	1	1	1
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	BPPTPM		17	53	53	53	53	53
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	Setda - Pemum, Bapermas KB	-	-	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>									
<b>1.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Dinsosnakertrans	179,40	180,87	180,97	181,75	181,66	182,42	183,22
1.2.	Rasio ketergantungan (%)	Dinsosnakertrans	49,06	49,69	50,66	52,00	53,03	54,20	53,44